

Peraturan hukum dalam penyediaan lahan untuk investasi industri biodiesel di Indonesia sebagai energi terbarukan

Mochmad Yusuf Adidana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269689&lokasi=lokal>

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan memperhatikan teori berjenjang (stufen bow) dari Hans Kelsen. teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian dan ensiklopedi. Penelitian dilakukan kepada masalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penanaman modal dan lebih khususnya mengenai penyediaan lahan mendukung untuk industri biodiesel atau sebaliknya. Dalam kondisi saat ini dimana harga minyak bumi semakin mahal dan ketersediaannya semakin langka, maka sudah saatnya bangsa Indonesia mulai menggunakan energi alternatif. Salah satu energi alternatif yang dapat dikembangkan, adalah biodiesel yang berasal dari tanaman jarak pagar (*Jatropha curcas*). Untuk mengembangkan energi baru ini tentunya dibutuhkan permodalan yang sangat besar, salah satu cara memperoleh permodalan ini adalah dengan mengundang penanam modal. Hukum melalui perangkat perundang-undangan mempunyai peran yang penting bagi percepatan penanam modal dalam industri ini. Ada beberapa peraturan yang mempunyai keterkaitan cukup erat dengan penanaman modal di bidang industri biodiesel dan penyediaan lahan untuk kepentingan tersebut, diantaranya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No 30 tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Pemerintah No 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada cukup mendukung pengembangan industri ini. Namun demikian, industri biodiesel belum berkembang sesuai yang diharapkan, karena kurangnya peraturan teknis yang mendukung.

.....The method used is a normative legal research methods with regard tiered theory (stufen bow) of Hans Kelsen. techniques of data collection is done through the review of data obtained from the law, textbooks, journals, research, and encyclopedias. The study was conducted to the issue of whether legislation exists on capital investment and more particularly regarding the provision of land to support the biodiesel industry or vice versa. In the current conditions in which the price of oil more expensive and increasingly scarce availability, it is time for the Indonesian people start using alternative energy. One of the alternative energy that can be developed, is biodiesel derived from *Jatropha* (*Jatropha curcas*). To develop this new energy would need a huge capital, one way to obtain this capital is to invite investors. Law via legislation has an important role for the acceleration of investors in this industry. There are some rules that is linked quite closely to the investment in the biodiesel industry and the provision of land for this purpose, including Law No. 32 of 2004 on Regional Government, Act No. 25 of 2007 on Investment, Law No. 26 2007 on Spatial Planning, Law No. 30 of 2007 on Energy, Presidential Decree No. 5 of 2006 on National Energy Policy, Government Regulation No. 36 of 1998 on Control and Utilization of Abandoned Land and Regulation of State Minister of Agrarian / BPN No. 2 of 1999 on the Permit Area. As a result of this study concluded that

the existing regulations sufficient to support the development of this industry. However, the biodiesel industry has not developed as expected, due to lack of technical regulations that support.